

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian keempat akan memuat ringkasan secara umum lokasi penelitian, yakni di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Demak. Di samping itu membahas tentang hasil dari penelitian yang relevan terhadap judul penelitian yakni “Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Ideologi Pancasila Terhadap Masyarakat di Kabupaten Demak”. Selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya, oleh karena itu fokus analisis pada hasil penelitian ini terkait dengan: Tindakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Memperkuat Ideologi Pancasila pada Masyarakat Kabupaten Demak.¹

A. Profil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak

Wilayah Kabupaten Demak terletak di bagian utara Pulau Jawa, memiliki luas wilayah mencapai 89.743 hektar, dengan jarak antara bentangan Utara ke Selatan sekitar 41 kilometer dan Timur ke Barat sekitar 49 kilometer, serta berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Beberapa Kecamatan yang secara langsung berbatasan dengan Laut Jawa meliputi Kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung. Dari segi geografis, Kabupaten Demak terletak pada rentang Bujur Timur 110° 27' 58" - 110° 48' 47" dan Lintang Selatan 6° 43' 26" - 7° 09' 43", dengan batas administratif wilayah yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Di utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
- b. Di timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
- c. Di selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang.
- d. Di barat berbatasan dengan Kota Semarang.

Kabupaten Demak merupakan daerah agraris, di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Wilayah Kabupaten Demak dominan terdiri dari lahan sawah, mencapai sekitar 50.893 hektar atau 56,71% dari luas total wilayah. Sisanya adalah lahan kering. Dalam penggunaannya, sebagian besar lahan sawah menggunakan irigasi teknis sebanyak 36,11%, diikuti oleh tadah hujan

¹ Aninda Puri et al., “Analisis Faktor Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang,” *Journal Publichuo* 4, no. 2 (2021): 433, <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18076>.

sebanyak 34,83%, dan teknis serta sederhana sebanyak 29,06%. Sementara itu, untuk lahan kering, sekitar 34,82% digunakan untuk tegal/kebun, 29,60% untuk bangunan dan halaman, serta 18,17% untuk tambak.²

B. Visi dan Misi Kabupaten Demak

Visi Kabupaten Demak

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Misi Kabupaten Demak

- Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan ber masyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya
- Meningkatkan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

C. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Tugas-Tugasnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak bertanggung jawab dalam membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintah umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak menjalankan tugasnya dengan melibatkan sejumlah fungsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

1. Merumuskan kebijakan di sektor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, dan Organisasi Kemasyarakatan.
2. Menjalankan kebijakan di sektor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, serta Organisasi Kemasyarakatan.
3. Melakukan evaluasi dan penyampaian laporan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, dan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Menyelenggarakan, membina administrasi, dan kesekretariatan untuk semua unit kerja di lingkungan Badan.

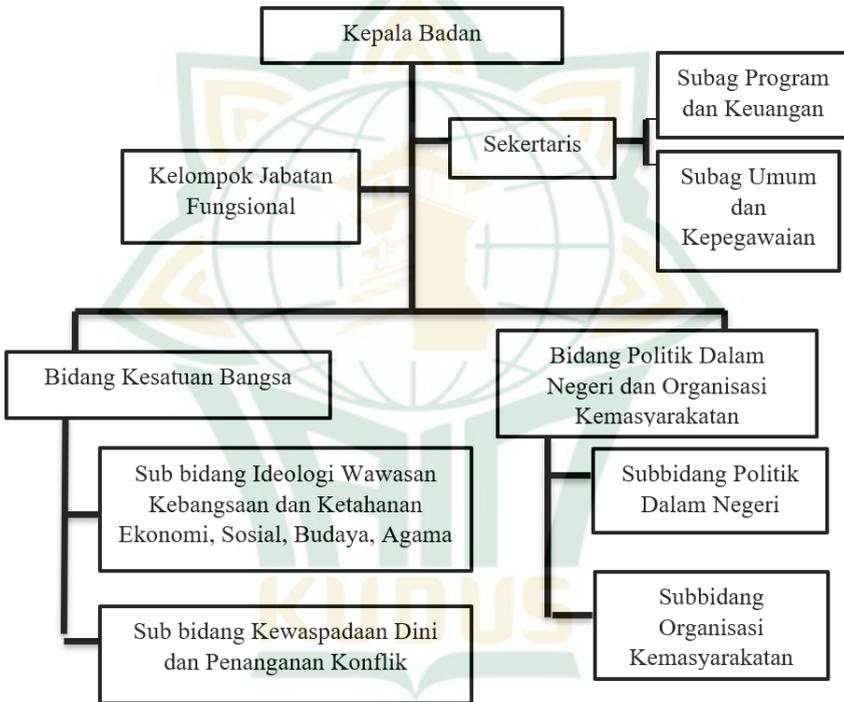
² Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak dalam Angka 2020, “Kondisi Letak Geografis Kabupaten Demak,” n.d., <https://demakkab.bps.go.id/indicator/153/35/1/luas-daerah.html>.

5. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilengkapi dengan struktur organisasi yang teratur. Struktur organisasi tersebut terdiri dari susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



E. Bidang-bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Sekretariat Badan

Tanggung jawab Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melibatkan keterlibatan dalam merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan program, serta manajemen aspek keuangan, umum, kepegawaian, tatausahaan, hukum, hubungan masyarakat, dan organisasi. Selain itu, Sekretariat juga memiliki tanggung jawab dalam

mengkoordinasikan perencanaan dan pelaporan di lingkungan badan.

2. Bidang Kesatuan Bangsa

Dalam lingkup tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang Kesatuan Bangsa bertugas dalam menyusun program kerja, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, melakukan monitoring, evaluasi, serta menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan sub-bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Selain itu, bidang ini juga memiliki tanggung jawab terhadap sub-bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bagian Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Badan, mempunyai tugas yang melibatkan penyusunan program kerja, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, melakukan monitoring, evaluasi, dan menyampaikan laporan terkait dengan aspek Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam lingkup politik dalam negeri.³

4. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keberadaan sumber daya manusia menjadi unsur krusial yang perlu ada di setiap lembaga atau perusahaan, karena hasil kerja dari para karyawan akan menjadi faktor kunci bagi tingkat kinerja secara keseluruhan dari lembaga atau perusahaan tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan. Informasi mengenai komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat ditemukan dalam gambar atau tabel berikut ini:

³ “No Title,” n.d., https://bakesbangpol.demakkab.go.id/?page_id=939.

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP	0	0	0	0	0
2	SMA	2	0	2	1	5
3	D3	0	0	0	0	0
4	S1	4	2	3	1	10
5	S2	3	0	0	0	3
6	S3	0	0	0	0	0
	Jumlah	9	2	5	1	18

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak.

Dari total pegawai sebanyak 18 individu, terdiri dari 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 Non-PNS, dengan komposisi 14 orang laki-laki dan 3 orang perempuan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jika dilihat dari aspek tugas pokok dan fungsi, komposisi yang menunjukkan lebih banyak laki-laki dibanding perempuan dinilai sesuai, mengingat adanya lebih banyak tugas di luar kantor.

Struktur pegawai atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditentukan berdasarkan golongan pangkat. Rincian komposisi pegawai berdasarkan Kualifikasi Golongan dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Komposisi Pegawai

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	0	1
2	Golongan III	6	2	8
3	Golongan IV	2	0	2
4	Non ASN	6	1	7
	Jumlah	15	3	18

Sumber : Diolah Peneliti Berdasarkan Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak.

F. Deskripsi Data Penelitian

Penjelasan data penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan upaya dalam memperkuat Ideologi Pancasila terhadap masyarakat di Kabupaten Demak. Dalam deskripsi penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan berbagai pihak serta data terkait yang dapat memberikan gambaran tentang implementasi Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Ideologi Pancasila di tengah masyarakat Kabupaten Demak.

1. Isu-isu Strategis Ideologi Pancasila di Kabupaten Demak

Isu terkait Pancasila di Kabupaten Demak biasanya melalui isu agama yang menjadi pedoman bagi setiap bangsa, Setiap individu, tanpa memandang agama yang dianut, perlu menciptakan kesempatan untuk saling memahami dan menghormati nilai-nilai yang ada dalam hati masing-masing. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya konflik yang tidak diharapkan, sehingga diperlukan wadah dialog sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terkait isu di Kabupaten Demak biasanya melalui isu Agama tetapi isu tersebut relative kondusif. Seperti yang di terangkan oleh Ibu Rifah Utami bahwasanya:

“Baik mbak jadi isu terkait Pancasila di Kabupaten Demak masuk melalui isu agama namun di Kabupaten Demak relatif kondusif, karena dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu mengadakan seminar terkait penguatan ideologi pancasila untuk Masyarakat kabupaten Demak agar tidak terjadi radikalisme agama. Dengan Masyarakat mengikuti seminar dialog percakapan bisa membuka wawasan untuk komunitas yang ada di Kabupaten Demak”⁴

Dari wawancara tersebut sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Rifa Utami, mengatasi isu tersebut harus melakukan seminar atau dialog Bersama Masyarakat Kabupaten Demak. Perihal tersebut juga diungkapkan Bapak Anwar Sukroni selaku masyarakat Kabupaten Demak, bahwasanya:

⁴ Rifah Utami, “Wawancara oleh Penulis,” 3 Juli 2023.

“oh iya saya selaku masyarakat Kabupaten Demak sering mengikuti seminar atau dialog Bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Penguatan Ideologi Pancasila dalam kehidupan ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang saling menghormati, menjaga martabat dan berlaku adil terhadap siapapun tanpa memandang agama dan sebagai warga negara sudah seharusnya menerapkan nilai Pancasila agar tidak terjadi konflik antar umat beragama”⁵

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya isu terkait penguatan ideologi Pancasila Relatif kondusif, dengan adanya seminar atau dialog Bersama masyarakat Kabupaten Demak sehingga tidak ada konflik antar umat beragama dan Badan Kesatuan Bangsa melakukan seminar ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan.

Menguatkan Ideologi Pancasila dengan memasukkan pemahaman Pancasila ke dalam aktivitas sehari-hari. seperti yang di jelaskan ibu Rifa Utami, bahwasanya:

“oh jadi gini mbak untuk menerapkan nilai-nilai dalam penguatan ideologi yang paling efektif itu dengan menanamkan pemahaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, tapi juga ada tantangan dalam pembinaan ideologi Pancasila mbak untuk masyarakat yang masih sulit berfikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup dikarenakan masih ada Sebagian masyarakat yang ego sentris mbak”⁶

Hasil dari wawancara dengan Ibu Rifa Utami selaku sub bagian Ideologi bahwa penerapan nilai Pancasila sangat penting untuk kehidupan masyarakat dan terdapat tantangan bahwa masyarakat masih sulit untuk menerapkan nilai Pancasila. Perihal tersebut diungkapkan juga oleh ibu Rihadini selaku masyarakat kabupaten Demak, bahwasanya:

“saya salah satu masyarakat Kabupaten Demak sudah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan di kampung kita sama-sama saling menghormati, menjaga martabat dan berperilaku baik sesama warga tanpa memandang agamanya, disini ada yang beragama Kristen mbak tapi saya selaku masyarakat kabupaten

⁵ Anwar Sukroni, Wawancara oleh Penulis, 6 Agustus 2023.

⁶ Rifah Utami, Wawancara oleh Penulis, 3 Juli 2023.

demak tidak pernah membeda-bedakan dengan orang yang beragama Kristen, menurut saya menerapkan nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari apalagi kita ini tinggal di kampung mbak jadi kalo bisa jangan sampai ada konflik sesama tetangga”⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya dimulai dari lingkungan terdekat. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dianggap sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, sangatlah esensial untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi sikap yang tercermin dalam tindakan sehari-hari.

2. Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Ideologi Pancasila Terhadap Masyarakat di Kabupaten Demak.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak telah mengambil berbagai langkah untuk secara efektif melaksanakan suatu kebijakan sesuai peraturan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rifa Utami, Sub bagian Ideologi, beliau menyampaikan program dan upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memantau serta membina ideologi Pancasila di Kabupaten Demak, bahwasanya:

“Upaya KESBANGPOL dalam penguatan ideologi Pancasila yaitu dengan mengadakan program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi elemen masyarakat baik generasi muda dan tokoh pemuda Demak serta Organisasi Kemasayrakat mbak, nah yang jadi sasaran utama ini yaitu anak usia dini yang belum terkontaminasi dengan budaya barat dengan memberikan bekal baik melalui pendidikan sekolah maupun seminar wasawasan kebangsaan”⁸

Hasil wawancara ini KESBANGPOL akan melakukan seminar wawasan kebangsaan terhadap masyarakat sesuai dengan pernyataan diatas masyarakat harus mengikuti seminar tersebut guna memperkuat penguatan ideologi Pancasila.

⁷ Rihadini, wawancara oleh penulis, 7 agustus 2023.

⁸ Rifah Utami, Wawancara oleh Penulis, 3 Juli 2023.

Wawancara diatas sebagaimana yang di sampaikan oleh KESBANGPOL bahwa masyarakat harus mengikuti seminar dan darimana mendapatkan Pendidikan Pancasila yang di peroleh selama ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Anwar Sukroni, bahwasanya:

“saya mendapatkan Pendidikan Pancasila sejak di jenjang sekolah, khususnya Sekolah Dasar sampai dengan saya SMA, menurut saya Pendidikan Pancasila adalah salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang lebih bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mbak”⁹

Pernyataan diatas tidak jauh berbeda dengan Bapak Suparjo Bahwasanya:

“Pendidikan Pancasila mata Pelajaran wajib tapi saya mendapatkan Pendidikan Pancasila sejak saya SD sampai sekarang, walaupun saya ini hanya lulusan SD tapi saya sa mpai sekarang tetap menerapkan nilai pancasila di kehidupan sehari-hari mbak”¹⁰

a) Pemahaman Masyarakat Tentang Sila-sila Dalam Pancasila

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat demak apakah sudah mengetahui sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, hal ini akan disampaikan oleh Anwar sukroni selaku masyarakatat demak bahwasanya:

“Ya mbak saya sudah mengetahui tentang sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, singkat saja ya mbak sila pertama harus bersyukur dalam menjalani kehidupan serta bertoleransi dan menghormati agama, sila kedua kita harus bersikap sopan dan menghindari diskriminasi kalo bisa mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Sila yang ketiga menghargai satu sama lain atau berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong sebagai pemersatu. Sila ke empat yaitu memberikakan pendapat untuk mencapai keputusan Bersama yang lebih baik sehingga kita menghargai sistem demokrasi secara adil tanpa kecurangan yang terpenting itu tidak terprovokasi oleh isu-isu, yang terakhir mengutamakan keadilan tanpa memandang sosial. Menurut saya ya begini nilai Pancasila mbak”¹¹

⁹ Anwar sukroni, Wawancara oleh Penulis 06 Agustus 2023.

¹⁰ Suparjo, “Wawancara Oleh Penulis,” 06 Agustus 2023.

¹¹ Anwar Sukroni, “Wawancara oleh Penulis,” 06 Agustus 2023.

Penjelasan yang tidak jauh berlainan juga dinyatakan oleh Bapak Suparjo:

“nilai Pancasila yang terkandung pada sila 1 sampai 5 yaitu sila pertama yakin adanya Tuhan Yang Maha Esa menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, sila yang kedua contohnya adil sesama manusia, yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga mengakui keragaman suku dan budaya, yang ke empat mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan dan yang terakhir yaitu mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Itu yang saya ketahui mengenai nilai-nilai Pancasila mbak”¹²

Selain itu penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting sebagaimana disampaikan oleh Anwar Sukroni :

“penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting tujuannya agar apa mbk? Tujuannya itu agar menciptakan kerukunan di negara Indonesia ini dan tumbuhnya rasa kedisiplinan pada masyarakat Indonesia dan sikap toleransi serta tidak membedakan mbak”¹³

Pernyataan di atas juga di sampaikan oleh Bapak Suparjo bahwasanya:

“tak kasih contoh mbak dalam menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari contohnya tidak malas beribadah, tidak membedakan agama, bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat”¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan berbagai upaya dalam memperkuat ideologi Pancasila. Salah satu metodenya adalah melalui penyelenggaraan seminar wawasan kebangsaan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah potensi konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas..

¹² Sukroni.

¹³ Sukroni.

¹⁴ Suparjo, “Wawancara Oleh Penulis.”

G. Analisis Hasil Penelitian

1. Isu-Isu Strategis Ideologi Pancasila di Kabupaten Demak

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki peran utama di Kabupaten Demak. Didasari oleh Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021, badan ini ditetapkan dengan menentukan posisi, struktur organisasi, tugas, dan fungsi. Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah umum di sektor kesatuan bangsa dan politik. Dalam menjalankan tugasnya, badan ini memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik, baik dalam lingkup dalam negeri maupun organisasi kemasyarakatan. Bagian kesatuan bangsa, yang bertanggung jawab kepada kepala badan, memiliki tanggung jawab menyusun kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di berbagai bidang seperti ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

a) Isu-Isu Terkait Ideologi Pancasila di Kabupaten Demak

Isu juga dapat dianggap sebagai hasil dari tindakan seseorang yang berdampak pada negosiasi pribadi dan penyesuaian, litigasi sipil dan kriminal yang dapat menjadi masalah dalam kebijakan publik melalui peraturan legislatif. Menurut Regester dan Larkin, isu mencerminkan kesenjangan antara praktik perusahaan dengan harapan para pemangku kepentingannya.¹⁵

Dalam merumuskan masalah strategis di Kabupaten Demak, identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan kondisi aktual Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan menganalisis lingkungan hidup yang bersifat strategis, tujuan akhirnya adalah merumuskan regulasi terkait isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak.

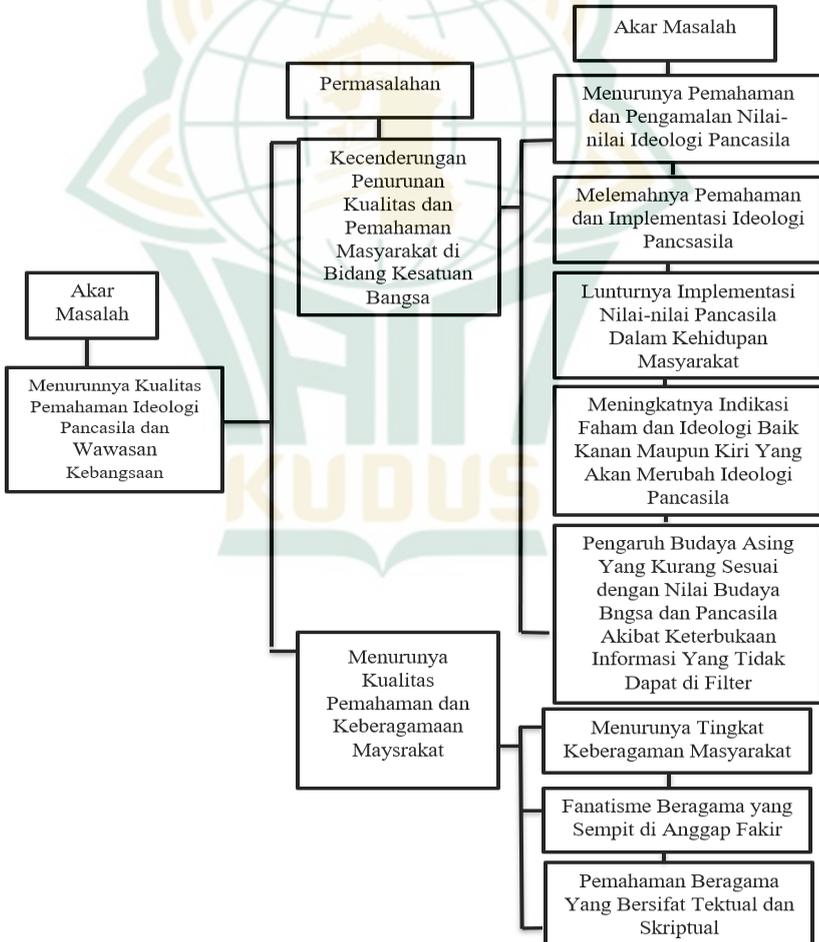
Dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat dinyatakan bahwa permasalahan utama dalam pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

¹⁵ Tatar Bonar Silitonga, "Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 1 (2020): 15–28, <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.29271>.

1. Kurang optimalnya pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 2. Kurang optimalnya pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 3. Menurunnya kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
 4. Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat
- Permasalahan yang menjadi fokus dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait ideologi Pancasila terdapat pada poin ketiga, yang mencakup penurunan kualitas pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Berikut penjabaran permasalahan pokok, permasalahan dan akar permasalahan:

Gambar 4.2 Penjabaran Masalah



Berdasarkan uraian sebelumnya dan data informasi yang telah dianalisis, salah satu akar permasalahan dalam Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah penurunan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait bidang politik dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat meningkatkan risiko radikalisme, terorisme, dan konflik sosial yang berdampak pada ketidakstabilan wilayah.

Radikalisme merupakan pandangan atau aliran yang ingin mencapai perubahan sosial dan politik melalui tindakan kekerasan. Dalam konteks politik, radikalisme menunjukkan sikap yang ekstrem dalam suatu aliran. Cross menyatakan bahwa radikalisme melibatkan pengembangan perasaan yang tidak puas dalam masyarakat terhadap situasi yang dianggap perlu diubah, namun tidak cukup dengan langkah-langkah konvensional. Selain itu, ada juga konsep radikalisme keagamaan yang mengacu pada keyakinan bahwa perubahan besar diperlukan untuk mencapai kemajuan. Kata *radikal* berasal dari bahasa Inggris, yang artinya mencapai akar-akarnya, dan dalam konteks ini, radikalisme tidak diartikan secara negatif. Dalam konteks ini, radikalisme keagamaan merujuk pada upaya gerakan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan signifikan dalam bidang politik dan pemerintahan melalui penggunaan kekerasan. Perubahan politik yang diinginkan mungkin melibatkan transformasi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia.¹⁶

Pada dasarnya konsep radikalisme bukanlah konsep yang asing, yang menjadi indikasi radikalisme yaitu:

- a. Radikalisme adalah tanggapan terhadap situasi yang sedang berlangsung, umumnya berupa reaksi dan penolakan terhadap isu-isu, gagasan, dan nilai-nilai tertentu. Ini melibatkan upaya untuk menggantikan atau menentang elemen-elemen yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi yang tidak diinginkan, dengan menolak asumsi-asumsi atau nilai-nilai yang menjadi dasar dari situasi tersebut.
- b. Radikalisme tidak hanya berkutat pada penolakan terhadap suatu tatanan, melainkan juga aktif dalam usaha menggantikannya dengan paradigma atau pandangan dunia alternatif. Ini menunjukkan bahwa

¹⁶ Raharjo, "Dampak Radikalisme Atasnama Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Secara Luas."

radikalisme melibatkan suatu program atau visi tertentu terkait dengan perubahan yang diinginkan.

Menurut kartodirdjo radikalisme adalah Gerakan keagamaan yang bersifat menolak tatanan sosial yang ditandai dengan kemarahan moral dan menentang mereka yang mempunyai keistimewaa sedangkan Menurut Rubaid radikalisme adalah Gerakan keagamaan yang mencoba untuk sepenuhnya mereformasi tatanan sosial dan politik saat ini yang melalui kekerasan.

Radikalisme agama merupakan fenomena umum di Indonesia dan umumnya terkait dengan fundamentalisme agama. Fundamentalisme ini menonjolkan ideologi yang mengedepankan agama sebagai dasar utama dalam kehidupan masyarakat, dan sering kali disertai dengan upaya mengembalikan masyarakat pada nilai-nilai agama yang dianggap fundamental. Fenomena fundamentalisme umumnya muncul ketika kebebasan individu untuk kembali kepada ajaran agama terbatas oleh kondisi sosial dan politik dalam lingkungan masyarakat.¹⁷

Ancaman radikalisme dapat muncul dari sejumlah faktor, salah satunya adalah proses pendidikan yang dapat menjadi tempat terselipnya pemikiran radikal. Dengan demikian, penyusunan sistem pendidikan perlu mendapat perhatian serius dengan memperkuat ajaran Islam yang bersifat moderat, berdasarkan prinsip konsep rahmatan lil alamin. Di Indonesia, warga negara membutuhkan pendekatan moderat dalam beragama untuk memperkuat komitmen terhadap negara dan keagamaan. Moderasi diartikan sebagai sikap yang seimbang dan menjaga ketengahan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran agama.

Dalam radikalisme atasnama agama dapat berupa *attitude*, dalam prespektif sosiologi radikalisme merupakan kondisi alamiah yang dialami oleh masyarakat. Seseorang terlibat dalam Gerakan radikal ketika terkait dengan kelompok yang memiliki ideologi radikal, baik melalui interaksi langsung maupun melalui media online. Partisipasi dalam Gerakan tersebut dapat menyebabkan seseorang dianggap mendukung paham radikal. Umumnya, penyebaran ideologi radikal terjadi melalui ruang tertutup atau tempat ibadah.

¹⁷ Mulyadi dan Muzaki, "Kajian : Memaknai Arti Radikalisme," no. 100 (2020):

Radikalisme akan menyebabkan dampak negatif bagi kalangan masyarakat jika terus dibiarkan, dampaknya yaitu Menimbulkan keresahan di Tengah masyarakat dan Menghancurkan nasionalisme bangsa. Dari dampak ini Gerakan radikalisme bisa membuat masyarakat terancam, sehingga masyarakat menjadi resah.

Berkembangnya isu radikalisme pada masyarakat di Kabupaten Demak mendorong anggota polsek untuk mengadakan kegiatan sambang kepada tokoh agama setempat yang bertujuan untuk mencegah dan penanggulangan penyebaran faham radikal. Radikalisme ini mempunyai keinginan ambisi seseorang untuk mencapai pembahasan secara cepat melalui kekerasan. Pola penyebaran radikalisme yaitu melalui pendidikan, ekonomi, sosial. Dengan adanya sambangan ke tokoh agama di harapkan masyarakat Kabupaten Demak memahami bahaya radikalisme, untuk mencegah penyebaran faham radikalisme harus melibatkan semua tokoh agama dan tokoh masyarakat. Peran tokoh agama sangat signifikan dalam masyarakat, Terutama dalam menyampaikan pemahaman kepada jamaahnya mengenai ideologi radikal yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang berbeda.

Menurut Kementerian Agama, moderasi beragama mencakup komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Dalam konteks moderasi beragama, terdapat pilar utama yang melibatkan keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Beberapa nilai sikap moderat yang ditekankan mencakup tawassuth, tawazun, i'tidal, tasamuh, musawah, syura, islah, aulawiyah, tathawir wa ibtikar, serta tahadhdhur.

b) Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Ideologi Pancasila

Dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak, terdapat divisi khusus yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat. Acuan utama untuk pembinaan ini dapat ditemukan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021. Divisi yang memiliki kewenangan di bidang ini disebut sebagai Bidang Bina Ideologi. Sesuai dengan peraturan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berikut adalah arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penguatan Ideologi Pancasila di Kabupaten Demak

Tabel 4.3 Arah Kebijakan

Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan
		2023
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemantapan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan	Pemantapan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan
	Peningkatan Bela Negara, Pembauran kebangsaan dan Sejarah Kebangsaan	Pembinaan Bela Neagara dan Pembaruan Kebangsaan

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak.

Dari tabel di atas, diharapkan wawasan kebangsaan yang berasal dari ideologi Pancasila dapat menjadi kesadaran bersama bagi semua elemen masyarakat dan warga negara. Melalui pemahaman yang kuat terhadap wawasan kebangsaan ini, diharapkan pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat membentuk Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar, solid, bersatu, dengan semua kepentingan rakyat, bangsa, dan negara yang terakomodasi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa ke depannya, bangsa Indonesia dapat mengatasi dampak negatif dari nilai-nilai kehidupan global, baik yang tengah berlangsung maupun yang akan muncul.

Dengan memantapkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini melalui pendidikan masyarakat, Diinginkan agar dapat merangsang tumbuhnya semangat kebangsaan yang tumbuh kuat sebagai ekspresi dari pemikiran, sikap, dan tindakan. Ketika semua sikap dan tindakan yang dijalankan oleh masyarakat dan pejabat negara didasarkan pada semangat untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, maka akan terbentuk "national in-cooperated" dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

di berbagai aspek kehidupan. Dengan cara ini, bangsa dan negara ini akan tetap stabil, bersatu, dan memiliki daya saing yang kuat dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Pentingnya pemantapan nilai-nilai kebangsaan juga berlaku di lembaga-lembaga negara, melibatkan anggota legislatif di tingkat nasional dan lokal. Lembaga negara harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada pelaku usaha dan ekonomi nasional. Selain itu, generasi muda, terutama yang tergabung dalam organisasi kepemudaan, juga perlu mendapatkan pemantapan nilai kebangsaan.

Pancasila adalah dasar pandangan hidup dan identitas karakteristik bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai kebangsaannya menjadi dasar bagi kebudayaan nasional. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila mencerminkan ekspresi cita-cita hidup bangsa. Dengan bantuan Pancasila, potensi perpecahan dalam masyarakat Indonesia dapat dihindari dengan mudah, karena Pancasila mengedepankan keseimbangan, keselarasan, dan pandangan hidup yang didasarkan pada semangat kerukunan. Dengan demikian, segala perbedaan yang ada berkembang menjadi model kehidupan yang dinamis, yang penuh dengan keberagaman dalam kerangka kesatuan yang kokoh.¹⁸

Dengan aturan yang berakar pada prinsip-prinsip Pancasila, dimungkinkan untuk mengurangi ketidakadilan dan menciptakan rasa keadilan. Pancasila, sebagai dasar negara, secara komprehensif mencakup dan menyajikan pedoman yang jelas mengenai peraturan yang berlaku bagi seluruh individu tanpa ada diskriminasi. Pancasila, sebagai panduan bagi hukum, bertujuan menciptakan kondisi yang lebih baik dengan merujuk pada prinsip-prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan. Dengan cara ini, diharapkan agar masyarakat Kabupaten Demak dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan dimulai dari tindakan-tindakan sederhana yang mencerminkan eksistensi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, seperti partisipasi aktif dalam membersihkan lingkungan, saling bantu-membantu, dan menjaga hubungan harmonis tanpa memandang

¹⁸ Patimah et al., "Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa dan Masyarakat."

perbedaan agama. Semua ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah meresap dalam kehidupan berkelompok.¹⁹

2. Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Ideologi Pancasila di Kabupaten Demak

a. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bagian ini, disajikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran dalam mencapai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan bidang urusan. Berikut adalah capaian kinerja bidang Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Tabel 4.4 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Ormas yang mendapatkan peningkatan Wasbang	33	50	56	67	78	33	50	56	67	75
2	Persentase Ormas aktif	28	39	50	56	67	25	37	50	56	63
3	Kasus konflik antar umat beragama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Keberadaan aliran yang menyimpang dari nilai-nilai agama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Diolah Peneliti Berdasarkan Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2019-2023

Dari tabel tersebut bahwa indikator yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 4 program prioritas dan perencanaan, namun

¹⁹ Loura Hardjaloka, “Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 404–30.

dalam perjalanan guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan penyederhanaan program yang semula 4 program di ringkas menjadi 2 program namun indikator yang ditetapkan mampu menjawab indikator lain yang implisit.

Kinerja Program Kemitraan Pembangunan Wawasan Kebangsaan memiliki empat indikator yang difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keanekaragaman budaya dan nilai-nilai kebangsaan. Tujuan akhirnya adalah mendorong peningkatan rasa nasionalisme, cinta tanah air, serta menjaga persatuan dan kesatuan untuk kokohnya integrasi nasional. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Demak memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam memelihara dan memperkuat NKRI. Oleh karena itu, adalah tugas bersama untuk terus menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan melalui berbagai upaya peningkatan.

Organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai salah satu pilar demokrasi dan Pembangunan turut serta berperan aktif untuk mendorong peningkatan nasionalisme, cinta tanah air, Partisipasi organisasi masyarakat sipil (ormas/LSM) tidak hanya terbatas pada pencatatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melainkan juga melibatkan aktifitas nyata dalam pelaksanaan kegiatan hingga memberikan laporan secara berkala kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bentuk tanggung jawab atas keberadaan ormas/LSM tersebut di Kabupaten Demak, sehingga KESBANGPOL dapat memonitoring.

Tabal diatas dalam program Kemitraan Pembangunan Wawasan Kebangsaan adalah presentase ormas aktif, pada awal tahun perencanaan yang tidak dapat tercapai dengan baik dikarenakan setelah terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Sebagian tuntutan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, bahwa ormas tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan diri sehingga berimbas keengganan organisasi dan kelompok masyarakat mendaftarkan atau mencatat diri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Pembina dan pengawas ormas.

Adanya ormas menjadi penguat kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat, penguatan kebangsaan terhadap ormas dengan melaporkan keberadaan ormas kepada pemerintah di daerah melalui Bakesbangpol, melakukan

Kerjasama dengan pemerintah sehingga dapat mendukung program pemerintah.

Guna meningkatkan realisasi target tersebut kemudian dilakukan sosialisasi dan inovasi melalui kemudahan dalam pendaftaran dan pencatatan di KESBANGPOL. Pencatatan ormas bisa datang secara langsung ke pelayanan atau akses lewat web.

Dalam memudahkan pelayanan memiliki dampak yaitu masih banyaknya ormas yang sudah kadaluwarsa masa SKT nya namun belum mengajukan pemberitahuan atau pembaruan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya memverifikasi keberadaan organisasi tersebut dengan melakukan pengecekan melalui nomor telepon yang terdaftar dalam database. Harapannya, organisasi tersebut dapat segera memberikan pemberitahuan jika masih aktif berkegiatan, serta memberikan informasi terkait perubahan dalam kepengurusan.

Pemerintah Kabupaten Demak memiliki inovasi aplikasi yaitu Silayarmas untuk memudahkan layanan terhadap ormas di daerah setempat, dengan adanya aplikasi ini memudahkan ormas di Kabupaten Demak dalam mengurus SKT tanpa harus datang ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan politik. Selain melalui website Silayarmas.demakkab.go.id, oramas juga bisa menurus lewat gawai berbasis android. Adanya kemudahan layanan ini makin mendorong semua ormas di Kabupaten Demak tertib administrasi, termasuk melengkapi dengan surat keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel di atas menyoroti pentingnya pembinaan organisasi masyarakat melalui pendidikan politik, dengan tujuan mampu menjalankan tugas organisasinya tanpa menimbulkan konflik antar organisasi maupun masyarakat, terutama di kalangan remaja dan masyarakat umum. Pendidikan politik ini bertujuan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang sedang berlaku dan menekankan usaha pemahaman terhadap norma-norma serta nilai-nilai sebagai motivasi untuk membina dan mengembangkan diri, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan.

Hingga saat ini, interaksi dalam kehidupan masyarakat Demak menunjukkan bahwa organisasi masyarakat (ormas), terutama yang bersifat Islam, aktif dalam menyebarkan ajaran agamanya. Terkadang, ajaran ini juga diterima oleh masyarakat non-Muslim, seperti warga Kristen. Sebaliknya, dalam interaksi sosial di tengah masyarakat, terlihat adanya saling penghormatan antara berbagai kelompok agama. Keseluruhan ini menciptakan

lingkungan di mana masyarakat saling menghormati dan berpartisipasi dalam semangat gotong royong.

Dalam usaha untuk mengatasi pandangan yang dapat mengganggu harmoni masyarakat di Kabupaten Demak, setiap organisasi masyarakat (ormas) di Kota Demak terus menekankan pemahaman bahwa Islam bukanlah agama yang radikal. Sebaliknya, Islam dipandang sebagai agama rahmatan lil'alamin. Keberlangsungan kehidupan yang harmonis menunjukkan bahwa toleransi dan penolakan terhadap nilai-nilai radikalisme masih tetap terjaga di Kabupaten Demak.

Peran yang perlu dipertahankan agar tidak terjadi peristiwa yang dapat merusak hubungan baik antarwarga, baik dalam satu suku yang sama maupun berbeda atau antaragama lainnya adalah dengan bersama-sama berkolaborasi untuk saling berhati-hati agar tindakan provokasi tidak dengan mudah merusak kehidupan sosial di tengah masyarakat. Ini dapat dicapai dengan saling berbagi informasi dan melaporkan kepada pemerintah Kota Demak, sehingga tindakan yang tepat dapat segera diambil.

Pemerintah Daerah bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) memiliki peran dan fungsi khususnya di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak yang berbunyi:

“Badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas dan pokok membantu bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional, bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang politik azaz otonomi dan tugas pembantuan.”

Divisi khusus yang bertugas dalam pembinaan ideologi Pancasila di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021. Divisi ini, yang disebut Bidang Bina Ideologi, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat. Sesuai dengan regulasi tersebut, Bidang Bina Ideologi juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berikut Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Ideologi Pancasila di Kabupaten Demak
Tabel 4.5 Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi	Kebijakan
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemantapan Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan
	Peningkatan Bela Negara, Pembaruan kebangsaan dan Sejarah kebangsaan

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Data Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak

Acuan dalam menentukan jati diri dapat ditemukan dalam nilai-nilai Pancasila yang semakin mendapat kepercayaan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai metode dan pendekatan.²⁰

Penerapan sila pertama Pancasila, yang mencerminkan keagungan, menjadi ungkapan dan tanggapan dalam aspek-aspek kehidupan beragama, kemanusiaan, keadilan, dan tatanan negara. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dapat dicapai melalui pengembangan sikap penghormatan, di Kabupaten Demak mengedepankan kerukunan antar umat beragama, dengan mengikuti pengajian dan biasanya Masyarakat Kabupaten Demak Sebagian besar Perempuan mayoritas mengikuti acara Fatayat dan Muslimat sedangkan kaum laki-laki lebih mengikuti rutinan Ansor yaitu dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW Melalui prinsip pertama inilah pendekatan terhadap nilai-nilai kehidupan diwujudkan.

Dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia dianggap sebagai entitas yang terdiri dari berbagai unsur, seperti jiwa, makhluk individu, refleksi, individu yang mandiri, serta ciptaan Tuhan yang tercermin dalam nilai-nilai kehidupan dan realitas, termasuk kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Pada konteks Kabupaten Demak, prinsip kedua ini mengekspresikan penghargaan terhadap sesama, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Penerapan

²⁰ Widiatama, Mahmud, dan Suparwi, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.”

sila kedua nilai-nilai Pancasila dicapai melalui toleransi antarpribadi, saling menghormati dan mengakui, serta senantiasa memperlakukan setiap orang secara adil.

Dalam praktiknya pada sila ketiga, nilai persatuan di Indonesia melibatkan interaksi hidup berdampingan di mana individu memiliki persamaan dan perbedaan alami dengan orang lain. Prinsip persatuan dapat diimplementasikan dengan menghidupkan perbedaan-perbedaan yang memiliki daya tarik untuk bekerjasama dan saling mendukung, sehingga tercipta kehidupan harmonis yang didasari oleh kerjasama. Kooperatif dan kooperatifnya masyarakat Indonesia menggambarkan bagaimana prinsip persatuan memberikan ruang leluasa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan Indonesia dengan perilaku gotong royong.

Nilai kerakyatan yang dipandu oleh kebijaksanaan refleksi/representasi. Sistem demokrasi di Indonesia didasarkan pada kebijaksanaan dan pencapaian kesepakatan. Demokrasi diwujudkan atas kesadaran bahwa setiap manusia memiliki nilai dan kedudukan yang sama, terlebih lagi sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip keempat ini dapat diaplikasikan dalam masyarakat dengan memberikan apresiasi dan penghargaan, menghindari perilaku merendahkan, apalagi merusak, serta bersikap adil dalam pelaksanaan pemilu.

Prinsip inti kelima terkait dengan keadilan, di Kabupaten Demak, masyarakat diupayakan hidup secara adil dan sejahtera, baik secara materi maupun spiritual. Setiap individu diharapkan berperilaku adil, karena terciptanya keadilan sosial memerlukan kontribusi setiap orang yang bersikap dan bertindak adil terhadap sesama. Akumulasi nilai-nilai keadilan ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, di mana keadilan diterapkan di antara warga negara, mempertimbangkan prestasi individu dan kesetaraan dengan yang lain. Melalui penerapan nilai sila kelima ini, sikap adil terhadap seluruh lapisan masyarakat diutamakan, dan prinsip menjunjung tinggi hukum sesuai dengan aturan menjadi prioritas untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Untuk memperkuat serta mengokohkan etika di dalam kehidupan sosial, kehidupan sebagai bangsa, dan dalam negara, dilakukan melalui pengakuan dan penerapan nilai-nilai tinggi dari Pancasila. Oleh karena itu, lingkungan sosial perlu diorganisir sebagai ruang atau tempat yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai etika Pancasila yang dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan upaya yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan perubahan dalam masyarakat untuk memperkuat ideologi Pancasila dalam pendidikan. Fokusnya adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi elemen kunci dalam proses "nalar berfikir dan nalar nilai" di lingkungan pendidikan Islam, selain dari "nalar agama".

Secara prinsip, melalui pemahaman mendalam terhadap arti, hakikat, dan muatan setiap sila Pancasila, dapat disimpulkan bahwa Pancasila secara keseluruhan layak menjadi bagian integral dari identitas bangsa Indonesia dan berperan sebagai fondasi ideologis negara. Setiap sila Pancasila, sebagai landasan falsafah negara, mencakup makna yang mutlak, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selaras dengan prinsip alam yang sesuai dengan konsep ketuhanan yang bersifat abstrak, persatuan bangsa, keadilan, dan kebersamaan. Dalam teori yang sudah dijelaskan bahwasanya dengan cara menanamkan nilai Pancasila akan memperkuat ideologi Pancasila terhadap masyarakat.

Dalam pandangan penulis, tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengelola masalah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah tugas yang kompleks dan tidak dapat diatasi secara mandiri oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang optimal antara semua divisi atau unit kerja dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Setelah itu, peningkatan dan kolaborasi dengan semua pihak terkait, termasuk entitas eksternal Pemerintah Kabupaten Demak seperti Kepolisian (Polres) Demak dan Kodim Demak, para tokoh agama, dan juga masyarakat, bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan tindakan pencegahan. Jika pelaksanaan tugas berhasil, semua potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dalam usaha deteksi dini dan pencegahan, guna menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Kabupaten Demak dan mencegah timbulnya masalah yang tidak diinginkan.

keterlibatan ormas sebagai salah satu wadah warga, rakyat, masyarakat untuk mengapresiasi pikirannya ditengah masyarakat bangsa dan negara, peran ormas keberadaanya juga sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka terjalinnya suatu hubungan yang bersinergi dan harmonis di dalam membangun daerah, demi mewujudkan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah perlu menyatukan langkah kita bersama pemerintahan dan seluruh masyarakat dalam komponen masyarakat. Dalam hal ini harus bersifat sesama atau tanpa membeda-bedakan tapi harus membina perdamaian dan kerukunan antar sesama.

